

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah, daerah mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri tetapi masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang.

Undang - Undang No. 9 Tahun 2015 mengatur tentang otonomi daerah dimana hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 9 Tahun 2015 (Pasal 101) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran dan sebagai rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Menurut UU No. 9 tahun 2015 proses penyusunan anggaran melibatkan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak legislatif (DPRD), dimana kedua pihak tersebut melalui panitia anggaran. Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dengan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, kemudian pihak legislatif menetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya dirapatkan.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat dalam era otonomi daerah. Hal ini cukup logis, karena dalam era otonomi masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengadakan kerja sama internasional di daerah provinsi.

Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah

tersebut. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan.

Tabel 1.1  
Data Pendapatan Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan Kabupaten dan Kota  
Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2015.

No	KABUPATEN/KOTA	Tahun		
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1.	Sumba Barat	2.612.489,00	2.707.106,00	2.804.178,00
2.	Sumba Timur	3.039.591,00	3.138.855,00	3.244.438,00
3.	Kupang	3.247.498,00	3.227.025,00	3.354.389,00
4.	Timor Tengah Selatan	2.075.117,00	2.144.627,00	2.215.244,00
5.	Timor Tengah Utara	2.094.417,00	2.169.760,00	2.240.587,00
6.	Belu	2.885.286,00	2.996.451,00	3.128.873,00
7.	Alor	2.178.355,00	2.267.735,00	2.340.902,00
8.	Lembata	1.253.500,00	1.281.990,00	1.317.241,00
9.	Flores Timur	2.617.051,00	2.719.007,00	2.820.816,00
10.	Sikka	2.818.509,00	2.911.940,00	3.016.633,00
11.	Ende	2.971.166,00	3.101.347,00	3.264.971,00
12.	Ngada	2.770.164,00	2.879.571,00	2.977.854,00
13.	Manggarai	1.963.544,00	2.0299.49,00	2.103.662,00
14.	Rote Ndao	2.774.329,00	2.757.010,00	2.767.626,00
15.	Manggarai Barat	1.765.532,00	1.796.806,00	1.832.922,00
16.	Sumba Tengah	1.570.378,00	1.612.746,00	1.654.636,00
17.	Sumba Barat Daya	1.317.623,00	1.368.154,00	1.419.475,00
18.	Nagekeo	2.267.660,00	2.335.908,00	2.415.483,00
19.	Manggarai Timur	1.484.679,00	1.545.642,00	1.609.866,00
20.	Sabu Raijua	2.024.826,00	2.088.679,00	2.129.464,00
21.	Malaka	2.566.525,00	2.648.737,00	2.748.662,00
22.	Kota Kupang	6.042.008,00	6.305.012,00	6.578.307,00

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota 2017.

Tabel 1.1 menunjukkan rata-rata Pendapatan Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 hingga 2015 mengalami peningkatan secara berkala. Hal ini dapat diartikan pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan tiap

tahunnya. Semakin tinggi pendapatan per kapita, memberikan indikasi semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kesenjangan ekonomi antar kota dan kabupaten di Nusa Tenggara Timur cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan Pendapatan per kapita tertinggi dan Pendapatan per kapita terendah. Kota Kupang sebagai ibukota provinsi memiliki pendapatan per kapita tinggi yakni pada tahun 2013 sebesar Rp 6.042.008,00 tahun 2014 sebesar Rp 6.305.012,00 tahun 2015 sebesar Rp 6.578.307,00 jauh meninggalkan daerah lain. Hal ini karena Kota Kupang terus berkembang menjadi pusat lalu lintas barang, layanan jasa, serta pusat pengembangan wilayah Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kabupaten dengan pendapatan per kapita terendah adalah kabupaten Lembata yakni pada tahun 2013 sebesar Rp 1.253.500,00 tahun 2014 sebesar Rp 1.281.990,00 tahun 2015 sebesar Rp 1.317.241,00. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah. Ekonomi daerah dengan konsentrasi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan pendapatan per kapita rendah cenderung mempunyai tingkat konsentrasi ekonomi yang lebih rendah.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah.

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.

Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan dana alokasi umum harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Tabel 1.2  
Data Dana Alokasi Umum Kabupaten dan Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2015.

No	KABUPATEN/KOTA	Tahun		
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1.	Sumba Barat	307.533.200.000,00	350.946.291.000,00	373.105.900.000,00
2.	Sumba Timur	515.736.111.000,00	561.028.322.000,00	591.063.048.000,00
3.	Kupang	534.827.407.000,00	598.332.549.000,00	622.237.030.000,00
4.	Timor Tengah Selatan	606.976.388.000,00	658.897.183.000,00	699.696.847.000,00
5.	Timor Tengah Utara	459.487.080.000,00	516.713.353.000,00	529.736.673.000,00
6.	Belu	578.912.159.000,00	349.381.471.000,00	461.698.140.000,00
7.	Alor	461.359.979.000,00	499.915.623.800,00	534.145.520.000,00
8.	Lembata	352.353.778.000,00	388.625.200.000,00	418.139.104.000,00
9.	Flores Timur	477.818.636.000,00	523.751.023.581,00	560.668.629.000,00
10.	Sikka	498.499.639.000,00	553.376.947.000,00	575.677.254.000,00
11.	Ende	506.181.070.000,00	546.281.332.000,00	580.052.378.000,00

12.	Ngada	350.219.646.000,00	410.643.171.000,00	434.333.102.000,00
13.	Manggarai	452.287.758.000,00	506.873.297.769,13	533.852.022.000,00
14.	Rote Ndao	345.248.896.000,00	361.623.423.000,00	384.157.631.000,00
15.	Manggarai Barat	382.403.558.000,00	440.831.612.139,00	469.802.864.000,00
16.	SumbaTengah	253.664.988.000,00	302.033.721.000,00	316.115.258.000,00
17.	Sumba Barat Daya	363.108.797.000,00	413.582.665.000,00	441.514.119.000,00
18.	Nagekeo	334.481.490.000,00	381.411.361.000,00	392.268.801.000,00
19.	Manggarai Timur	382.067.746.000,00	421.442.287.000,00	448.559.879.000,00
20.	Sabu Raijua	270.624.355.000,00	314.254.688.000,00	331.421.675.000,00
21.	Malaka	0	0	412.497.589.000,00
22.	Kota Kupang	527.785.630.000,00	597.674.909.206,00	623.321.955.000,00

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota 2017.

Tabel 1.2 menunjukkan rata-rata penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2013 hingga tahun 2015 setiap kabupaten dan kota berbeda dan mengalami peningkatan secara berkala. Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Kabupaten dengan penerimaan Dana Alokasi Umum terbesar yakni 2013 Rp 606.976.388.000,- tahun 2014 Rp 658.897.183.000,- tahun 2015 Rp 699.696.847.000,- sedangkan Kabupaten dengan penerimaan dana alokasi umum terendah adalah Kabupaten Sumba Tengah yakni pada tahun 2013 sebesar Rp 253.664.988.000,- tahun 2014 Rp 302.033.721.000,- tahun 2015 Rp 316.115.258.000,- . Kesenjangan penerimaan DAU ini paling tidak memberikan indikasi adanya ketimpangan fiskal yang masih cukup tinggi di setiap daerah. Dana alokasi umum bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pendanaan sebagaimana dimaksud diukur berturut-turut dengan jumlah penduduk,

luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik Pemerintah Daerah. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan kelancaran sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Dalam anggaran pemerintah daerah, porsi alokasi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi untuk belanja modal yang dilaksanakan pemerintah daerah akan memiliki *multiplier effect* untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh sebab itu, semakin tinggi angka rasio belanja modal dalam struktur APBD, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya semakin rendah angkanya semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Studi yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2004) menemukan bukti empiris bahwa dana transfer dalam jangka panjang berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.



Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat tersebut menyatakan bahwa pengalokasian anggaran belanja modal untuk kepentingan publik sangatlah penting.

Tabel 1.3  
Data Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2015.

No	KABUPATEN/KOTA	Tahun		
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1.	Sumba Barat	115.922.739.177,00	109.879.838.055,00	158.971.683.460,00
2.	Sumba Timur	186.930.545.671,00	176.635.601.066,00	233.615.810.630,00
3.	Kupang	120.201.877.363,00	123.375.912.034,00	152.441.310.330,00
4.	Timor Tengah Selatan	156.241.276.123,00	209.094.274.757,00	159.844.079.926,00
5.	Timor Tengah Utara	72.822.557.718,00	138.752.141.599,40	156.625.527.928,00
6.	Belu	138.804.341.844,00	125.694.275.775,00	155.489.233.185,00
7.	Alor	112.556.417.185,00	150.277.581.672,00	182.061.522.540,00
8.	Lembata	111.179.128863,41	93.584.668.353,87	110.109.377.858,00
9.	Flores Timur	89.970.361.601,00	88.192.733.204,00	116.876.776.935,00
10.	Sikka	98.764.041.544,00	103.217.101.364,00	105.372.972.386,00
11.	Ende	87.538.682.941,00	121.578.899.153,00	154.060.375.540,00
12.	Ngada	87.887.089.509,00	103.134.207.797,00	154.426.323.486,00
13.	Manggarai	208.164.101.865,00	234.412.975.686,00	300.130.363.623,00
14.	Rote Ndao	108.733.260.110,00	104.480.817.979,00	169.434.378.430,00
15.	Manggarai Barat	149.540.802.916,00	198.883.921.545,00	196.133.991.919,00
16.	Sumba Tengah	103.279.829.043,00	110.603.613.382,00	165.202.636.724,00
17.	Sumba Barat Daya	98.589.591.110,00	96.911.784.009,00	203.166.140.923,00
18.	Nagekeo	86.740.958.253,00	99.141.405.957,00	184.112.592.114,00
19.	Manggarai Timur	141.473.432.526,00	132.676.518.463,00	184.827.005.073,00
20.	Sabu Raijua	104.235.815.181,00	136.241.119.781,80	269.849.473.740,00
21.	Malaka	0	0	103.443.958.381,00
22.	Kota Kupang	97.597.312.221,00	122.955.020.199,00	151.327.467.097,00

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota 2017.

Tabel 1.3 menunjukkan Belanja Modal kabupaten dan kota tahun 2013 hingga 2015 mengalami peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah memulai efisiensi dalam pembangunan. Belanja modal terbesar adalah Kabupaten Manggarai yakni pada tahun 2013 Rp 208.164.101.865,00 tahun 2014 Rp 234.412.975.686,00 Rp tahun 2015 Rp 300.130.363.623,00 sedangkan belanja modal yang terendah adalah kabupaten Malaka yakni tahun 2013 tidak ada anggaran, tahun 2014 tidak ada anggaran tahun 2015 Rp 103.443.958.381,00

Peningkatan Belanja Modal ini dapat dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya adalah perbedaan kebutuhan dan prioritas pembangunan tiap daerah, perbedaan kelayakan dan ketersediaan fasilitas umum tiap daerah. Pembangunan di provinsi Nusa Tenggara Timur dengan karakteristik kepulauan membutuhkan penanganan yang berbeda, oleh karena itu dibutuhkan biaya besar terkait pembangunan infrastruktur penunjang seperti transportasi, energi, dan komunikasi.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Tabel 1.4  
 . Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2015.

No	KABUPATEN/KOTA	Tahun		
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1.	Sumba Barat	23.960.648.245,38	32.649.628.297,52	47.398.743.299,00
2.	Sumba Timur	40.056.503.749,08	62.609.245.757,00	66.290.916.752,00
3.	Kupang	42.968.411.294,60	59.620.693.840,59	67.270.792.446,37
4.	Timor Tengah Selatan	36.327.694.944,50	44.825.162.929,00	76.086.059.848,74
5.	Timor Tengah Utara	17.987.044.095,61	28.486.018.919,94	36.136.381.127,80
6.	Belu	63.821.368.066,00	48.358.913.019,00	72.408.429.831,00
7.	Alor	31.555.987.910,33	41.465.105.647,46	39.889.986.785,74
8.	Lembata	22.499.236.777,36	28.603.504.695,73	28.892.662.673,47
9.	Flores Timur	30.421.157.068,58	44.528.326.885,99	47.561.063.030,01
10.	Sikka	50.257.084.172,90	78.290.424.813,86	44.174.111.699,59
11.	Ende	42.292.586.631,94	61.000.829.122,68	59.449.629.992,52
12.	Ngada	30.327.867.805,30	38.948.646.034,33	42.585.723.246,38
13.	Manggarai	46.866.790.827,00	64.487.636.691,26	75.149.043.636,33
14.	Rote Ndao	17.646.843.269,96	25.072.666.421,18	27.089.991.977,44
15.	Manggarai Barat	34.182.554.706,90	51.499.162.120,17	64.742.881.466,81
16.	Sumba Tengah	13.434.323.080,94	19.270.679.660,63	22.023.682.161,02
17.	Sumba Barat Daya	16.736.225.911,83	36.675.146.234,63	44.191.272.752,00
18.	Nagekeo	15.764.401.082,56	24.618.925.077,46	28.618.512.239,25
19.	Manggarai Timur	19.017.226.449,18	22.053.561.300,68	41.665.748.921,64
20.	Sabu Raijua	14.497.305.245,26	26.975.204.349,00	30.262.370.498,00
21.	Malaka	0	0	25.020.134.187,00
22.	Kota Kupang	80.729.275.769,24	113.032.803.506,97	145.154.792.156,20

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota 2017.

Tabel 1.4 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah mulai menggali potensi-potensi pendapatan asli dari daerahnya sehingga PAD dapat meningkat sangat besar. Pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur yang tertinggi adalah kota Kupang yakni tahun 2013 Rp 80.729.275.769,24 tahun 2014 Rp 113.032.803.506,97 tahun 2015 Rp 145.154.792.156,20 dimana Kota Kupang adalah ibu kota provinsi dan menjadi pusat lalu lintas barang, layanan jasa, serta pusat pengembangan wilayah Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Pendapatan asli daerah di Nusa Tenggara Timur yang terendah pada tahun 2013 adalah Kabupaten Sumba Tengah yakni sebesar Rp 13.434.323.080,94 tahun 2014 kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp 22.053.561.300,68 dan pada tahun 2015 adalah kabupaten malaka sebesar Rp 25.020.134.187,00. Pendapatan asli daerah di setiap daerah berbeda-beda. Satu daerah lebih mengandalkan pajak daerah, tetapi daerah lain lebih mengandalkan retribusi daerah. Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografi dan lain-lain sehingga mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan tarif pungutan retribusi sangatlah bervariasi.

Dari fenomena yang ada peneliti merasa perlu melakukan penelitian. Penelitian ini mengacu pada peneliti terdahulu yang berkaitan dengan fenomena di atas, antara lain: (i) David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) dengan judul Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita di Provinsi Jawa dan Bali. Hasil penelitian ini

membuktikan DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan per kapita, belanja modal berpengaruh positif dalam hubungan tidak langsung melalui PAD, PAD berpengaruh terhadap pendapatan per kapita, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap PAD.

(ii) Rosyida Latifah(2010) dengan judul Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pendapatan Per Kapita (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Pulau Kalimantan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara positif terhadap belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal, Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal berpengaruh secara positif terhadap Pendapatan Per Kapita, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif terhadap Pendapatan Per Kapita.

Melihat penelitian terdahulu, terdapat perbedaan yang cukup signifikan, dan yang berbeda dari masing-masing penelitian ini adalah lokasi dan tahun periode penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, alasan dipilihnya Provinsi Nusa Tenggara Timur karena untuk mengulas lebih dalam lagi mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah kabupaten dan kota pasca otonomi daerah. Dan untuk periode tahunnya peneliti menggunakan tahun terbaru agar lebih *up to date*, yaitu tahun 2013-2016. Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “HUBUNGAN DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN PENDAPATAN PER KAPITA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013-2015”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Per Kapita?
2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Belanja Modal dan Pendapatan Per Kapita?
3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris hubungan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Per Kapita.
2. Untuk membuktikan secara empiris hubungan Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita.
3. Untuk membuktikan secara empiris hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan kebijakan kedepannya bagi

daerahnya. Sehingga kedepannya dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat agar daerahnya makin berkembang dan maju.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai pengalokasian Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah dengan baik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Perkapita suatu daerah.

3. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita di Provinsi Nusa Tenggara Timur.